

Dua Pilihan Masa Depan Kota Bogor

Rhiza S. Sadjad

Mahasiswa Program Studi S1 Sosiologi Universitas Terbuka

Bogor berada di persimpangan jalan. Sebagai konsekuensi dari hilangnya kawasan pedesaan di sekitar kota Bogor (*“Desa Hilang, Kota Terbilang”*, Radar Bogor 20/12/2024, hal. 3), Bogor saat ini tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari kota megapolitan Jabodetabek. Tapi sebenarnya ada alternatif lain. Bogor bisa juga direncanakan menjadi ibukota provinsi baru hasil pemekaran, yaitu provinsi Bogor Raya, yang meliputi wilayah eks-Keresidenan Bogor (kabupaten/kota Bogor, Sukabumi dan Cianjur), ditambah sebagian kecil wilayah Karawang, Bekasi dan Tangerang. Tidak seperti wilayah pedesaan yang bisa dibiarkan tumbuh dan berkembang (atau mati) secara alami, wilayah perkotaan harus dikembangkan dengan pengkajian dan perencanaan yang matang dan seksama, mengikuti kaidah-kaidah baku perencanaan kawasan perkotaan, supaya tidak menjadi kumuh, centang-perenang dan kacau-balau. Oleh karena itu, kota dan kabupaten Bogor mestilah jelas visinya: apakah akan tetap dibiarkan menjadi bagian dari kota megapolitan Jabodetabek (yang selanjutnya kita sebut sebagai opsi 1), atau menjadi ibukota provinsi Bogor Raya (disebut opsi 2)? Pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh kepala-kepala daerah yang baru terpilih di wilayah Jabodetabek, serta wilayah Jawa Barat pada umumnya, yang juga merupakan tantangan besar bagi warga masyarakat Bogor pada khususnya.

Opsi 1 dan opsi 2 masing-masing tentu ada kelebihan dan kekurangannya, ada kekuatan dan kelemahannya, serta memiliki berbagai tantangan dan peluang. Mungkin bisa diusulkan agar dibentuk 2 (dua) gugus-tugas. Gugus-tugas A dibentuk oleh pemerintah provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk mengkaji gagasan menjadikan kawasan Jabodetabek menjadi suatu kota megapolitan dengan sistem pemerintahan dan pengelolaan yang sama sekali baru. Sedangkan gugus-tugas B dibentuk bersama oleh pemerintah kota dan kabupaten Bogor untuk mengkaji kelayakan pembentukan provinsi Bogor Raya sebagai pemekaran dari provinsi Jawa Barat. Kedua gugus-tugas bekerja bersamaan secara paralel dan independen satu sama lain, untuk menghasilkan proposal berdasarkan kajian masing-masing. Nantinya salah satu dari kedua proposal itu akan dipilih oleh para pemangku kepentingan yang terdiri dari paling sedikit unsur-unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, parlemen pusat dan daerah, para pebisnis dan pemilik modal, para pakar dan akademisi serta warga masyarakat terkait. Untuk menghasilkan keputusan yang amat penting dan strategis bagi masa depan wilayah Bogor khususnya, dan kawasan Jabodetabek pada umumnya itu, diperlukan partisipasi aktif dari segenap warga masyarakat. Jika perlu bisa dilaksanakan referendum untuk menentukan pilihan opsi 1 atau opsi 2.

Gugus-tugas A dan B masing-masing terdiri para pakar dan praktisi, paling sedikit terdiri dari pakar dan praktisi dalam bidang ilmu pemerintahan, ilmu perencanaan kota, sosiologi perkotaan dan sosiologi pedesaan, serta ekonomi makro dan ekonomi mikro, yang biasa dan bersedia untuk bekerja menyusun hasil kajian berdasarkan analisis teori dan data, bukan sekedar berdasarkan opini atau intuisi. Kajian harus bersifat komprehensif, menyangkut berbagai dampak jangka panjang dalam bidang ekonomi (misalnya penciptaan lapangan kerja, perdagangan dan penanaman modal), infrastruktur sistem pemerintahan, sarana-prasarana fisik, keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup serta pewarisan budaya. Hasil kajian harus dengan jelas memperlihatkan bagaimana opsi 1 atau opsi 2 yang diambil akan meningkatkan *livability* atau kelayakan sebagai tempat tinggal dan mencari nafkah bagi seluruh warga masyarakat tanpa harus ada yang tersingkir atau digusur.

Kedua gugus tugas pertama-tama harus menyusun perkiraan awal dari analisis biaya dan keuntungan, baik yang tampak maupun tidak tampak, dari masing-masing opsi yang dikajinya. Perkiraan awal ini nantinya akan terus di-koreksi berdasarkan kajian dari masing-masing opsi yang dipilih. Misalnya untuk opsi 1, yaitu bergabung dengan megapolitan Jabodetabek yang dikaji oleh gugus-tugas A, keuntungannya secara umum akan memperluas akses warga masyarakat Bogor ke sarana-prasarana, lapangan pekerjaan dan berbagai sumber-daya melalui inter-konektivitas dan integrasi dengan wilayah-wilayah lain se-Jabodetabek. Sedangkan untuk opsi 2, yaitu menjadi ibukota provinsi Bogor Raya yang dikaji oleh gugus-tugas B, keuntungannya misalnya akan memperbesar otonomi bagi pemerintah daerah kota Bogor untuk merancang pembangunan wilayahnya sendiri tanpa bergantung pada wilayah lain, sehingga terlestarikan jati-dirinya sebagai warisan sejarah masa lalu, untuk diteruskan ke generasi yang akan datang.

Berdasarkan hasil kajian masing-masing gugus-tugas, bisa disusun model yang komprehensif dari pengembangan kota Bogor, baik jika dipilih opsi 1 mau pun jika dipilih opsi 2. Setelah diperoleh modelnya, maka selanjutnya dapat digunakan berbagai paket perangkat-lunak yang tersedia, seperti ArcGIS, QGIS, iTree, NetLogo, dan yang populer misalnya UrbanSim, untuk membuat simulasi dari pengembangan kota Bogor sampai jauh ke depan, misalnya sampai tahun 2045, ketika “Indonesia Emas” yang dicita-citakan kelak terwujud. Setelah jelas tergambarkan secara realistis dengan simulasi tersebut, bagaimana kiranya wujud masa-depan kota Bogor, baik jika dipilih opsi 1 mau pun opsi 2, barulah dilaksanakan proses pengambilan keputusan yang demokratis, yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan partisipasi aktif seluruh warga masyarakat kota dan kabupaten Bogor khususnya, serta warga masyarakat Jabodetabek pada umumnya.

Gunung Batu, akhir Desember 2024